

Bawaslu di Masa Non-Tahapan: Menjaga Demokrasi Saat Sunyi

Pemilu sering kali dipandang sebagai pesta demokrasi yang penuh warna. Hiruk pikuk kampanye, spanduk bertebaran di jalan, iklan politik berseliweran di televisi, hingga riuh rendah perdebatan di media sosial menjadi pemandangan sehari-hari. Semua orang membicarakan politik, memilih calon, dan terlibat dalam percakapan tentang masa depan bangsa. Pada saat itu, sorotan publik terhadap penyelenggara pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berada di titik puncak. Publik menunggu kiprah Bawaslu untuk menindak pelanggaran, mencegah kecurangan, dan memastikan proses berjalan adil.

Namun, setiap pesta ada akhirnya. Setelah kotak suara ditutup, suara dihitung, dan pemenang diumumkan, suasana kembali hening. Baliho diturunkan, media berhenti membicarakan kampanye, dan masyarakat kembali ke aktivitas sehari-hari. Pada momen inilah banyak orang beranggapan bahwa tugas Bawaslu selesai. Mereka sering

dipandang hanya relevan ketika pemilu berlangsung, lalu seakan-akan menghilang setelah pemilu usai. Padahal, kenyataannya tidaklah demikian.

Bawaslu tetap bekerja di luar tahapan pemilu. Masa non-tahapan, yang kerap dianggap sepi oleh publik, justru merupakan periode krusial yang penuh dinamika. Di balik kesunyian itulah benih-benih pelanggaran demokrasi mulai ditanam. Politisi memanfaatkan waktu ini untuk membangun citra, pejabat publik merancang strategi mempertahankan kekuasaan, bahkan aktivitas politik terselubung mulai bergulir. Jika dibiarkan, praktik-praktik itu akan meledak menjadi masalah serius ketika pemilu berikutnya tiba. Karena itu, peran Bawaslu di masa non-tahapan sangatlah penting, meskipun tidak selalu terlihat oleh mata publik.



Oleh
Alwi, S.E., S.H.
(Ketua Bawaslu Kab. Bone)

Masa non-tahapan ibarat malam yang sunyi di sebuah kota. Dari kejauhan tampak tenang, tetapi di balik pintu-pintu tertutup ada banyak pergerakan. Pertemuan elite politik berlangsung di hotel, lobi kekuasaan berjalan di ruang privat, dan kegiatan sosial disulap menjadi panggung pencitraan politik. Di beberapa daerah, baliho tokoh politik tetap berdiri megah meski pemilu masih jauh. Ada pula kepala daerah yang menyelipkan agenda politik dalam program bantuan sosial. Semua ini dilakukan secara halus, tanpa menyebut kata "kampanye", tetapi tujuannya sama: menanamkan pengaruh sebelum pemilu resmi dimulai.

Dalam suasana seperti ini, Bawaslu dituntut hadir sebagai pengawas yang waspada. Mereka harus mampu membedakan antara kegiatan sosial yang tulus dan kegiatan politik terselubung. Batas antara keduanya

sering kali tipis, nyaris tak terlihat. Tetapi di situlah letak seni pengawasan non-tahapan: **mengendus aroma pelanggaran bahkan sebelum ia benar-benar terjadi.**

Salah satu strategi penting Bawaslu di masa non-tahapan adalah pendidikan politik. Mereka hadir di kampus-kampus, mengajak mahasiswa memahami bahaya politik uang dan dampaknya bagi demokrasi. Mereka mendatangi desa-desa, membuka sekolah kader pengawasan partisipatif, melatih masyarakat agar bisa menjadi mata dan telinga pengawas. Mereka berdiskusi di warung kopi atau balai desa, membangun kesadaran bahwa memilih bukan sekadar penerima janji, tetapi juga penjaga demokrasi. Langkah ini sangat penting, karena pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh segelintir orang dalam struktur Bawaslu; ia membutuhkan partisipasi masyarakat luas.

Selain pendidikan, Bawaslu juga menyusun peta kerawanan pemilu.

Peta ini ibarat ramalan cuaca demokrasi. Dengan melihat sejarah pelanggaran, pola politik uang, potensi konflik SARA, hingga intensitas penggunaan media sosial, Bawaslu dapat memetakan daerah-daerah yang rawan. Hasilnya kemudian digunakan sebagai peringatan dini: wilayah tertentu perlu lebih diwaspadai, masyarakatnya perlu diberi edukasi lebih, dan aparat harus bersiap jika muncul gejala pelanggaran. Dengan begitu, pengawasan menjadi lebih proaktif dan terencana.

Namun, kerja Bawaslu di masa non-tahapan tidaklah mudah. Pertama, ada keterbatasan sumber daya. Anggaran lebih banyak difokuskan pada masa tahapan resmi, sehingga kegiatan di luar tahapan sering kali terbatas. Jumlah personel juga tidak sebanding dengan luasnya wilayah Indonesia. Kedua, kesadaran publik masih rendah. Banyak masyarakat yang menganggap pengawasan baru penting ketika pemilu sudah dekat, sehingga partisipasi di masa non-tahapan masih minim. Ketiga, regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan kewenangan kuat bagi Bawaslu untuk menindak aktivitas

politik dini. Banyak praktik terselubung yang tidak bisa dijerat aturan karena tidak secara eksplisit disebut sebagai pelanggaran.

Tantangan ini membuat posisi Bawaslu dilematis. Mereka melihat potensi pelanggaran, tetapi tidak selalu bisa menindaknya secara hukum. Akibatnya, Bawaslu lebih banyak mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan rekomendasi moral, yang meski penting, sering dipandang lemah oleh publik. Di sinilah kolaborasi menjadi jalan keluar.

Bawaslu berusaha menggandeng masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas digital. Dengan dukungan masyarakat, mata dan telinga Bawaslu semakin banyak. Media bisa membantu menyuarakan kritik, organisasi sipil bisa memperluas edukasi, sementara akademisi bisa memberikan riset untuk memperkuat analisis kerawanan. Di era digital, anak-anak muda yang aktif di media sosial menjadi mitra penting dalam



Oleh
Alwi, S.E., S.H.
(Ketua Bawaslu Kab. Bone)

memantau percakapan publik. Dengan melibatkan semua pihak, pengawasan demokrasi bisa menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab formal lembaga negara.

Akhirnya, peran Bawaslu di masa non-tahapan menemukan maknanya dalam menjaga demokrasi di luar sorotan. Demokrasi tidak hanya terjadi di hari pencoblosan. Ia adalah proses panjang yang berlangsung setiap hari, dalam obrolan warung kopi, dalam rapat desa, dalam kebijakan pemerintah, dan dalam aktivitas politik yang tidak selalu tampak. Jika masa non-tahapan diabaikan, maka ketika pemilu tiba, panggung demokrasi hanya akan menjadi sandiwara penuh manipulasi. Tetapi jika masa ini dijaga dengan baik, maka pemilu berikutnya akan lebih adil dan bermartabat.

“Bawaslu di masa non-tahapan adalah penjaga demokrasi dalam diam. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi keberadaannya menentukan arah bangsa. Mereka memastikan bahwa ketika rakyat kembali ke bilik suara, pilihan yang diambil benar-benar cerminan kehendak rakyat, bukan hasil rekayasa. Dan di situlah letak keagungan peran mereka: menjaga demokrasi bahkan di saat sunyi, ketika semua orang mengira pesta telah usai.”